

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU

Banjarbaru merupakan salah satu Kota di Kalimantan Selatan, yang sedang tumbuh dan berkembang sangat pesat, daerah terbuka dan urban, Berdasarkan Buku Profil Kota Banjarbaru yang tersebar di 5 (lima) kecamatan jumlah penduduk pada tahun 2013 220.168 Jiwa, tahun 2014 227.500 jiwa dan pada tahun 2015 234.801 jiwa. Pada tahun dengan indek kepadatan panduduk Kota Banjarbaru per Km2 adalah 631 penduduk.

Sebagai daerah yang terbuka berada di lintas strategis benua lima Kalimantan Selatan, Banjarbaru dicanangkan menjadi ibukota provinsi Kalimantan Selatan, dengan perpindahan kantor-kantor pemerintahan dan diikuti pertumbuhan ekonomi pembangunan menimbulkan persoalan tersendiri terutama eksodusnya penduduk dari berbagai daerah yang berusaha mencari keberuntungan dan memenuhi kebutuhan hidup ini menimbulkan persoalan sosial yang berkembang dimasyarakat .

Berbagai persoalan yang tumbuh dan berkembang berupa kemiskínan, kekerasan rumah tangga, anak terlantar, Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), orang terantar, gelandangan pengemis tuna netra, tuna Susila, anak jalanan dan sebagainya yang tergabung dalam Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Untuk menghadapi hal dimaksud Pemerintah Kota Banjarbaru berupaya secara maksimal mengatasi PMKS di Kota Banjarbaru.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pngelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Maka data PMKS ada 26 PMKS sebagai berikut :

**DATA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)
KOTA BANJARBARU TAHUN 2016 DAN 2017**

No	Jenis PMKS	Tahun 2016	Tahun 2017
1.	Anak Balita Terlantar	17	15
2.	Anak terlantar	151	114
3.	Anak yang berhadapan dengan hukum	8	11
4.	Anak Jalanan	6	5
5.	Anak dengan kedisabilitas (ADK)	63	64
6.	Anak yang menjadi Korban tindak kekerasan	1	66
7.	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	2	63
8.	Lansia Usia Terlantar	286	203
9.	Penyandang Disabilitas	213	261
10.	Tuna Susila	301	-
11.	Pengemis	12	11
12.	Gelandangan	2	2
13.	Pemulung	43	50
14.	Kelompok Minoritas	4	4
15.	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWLP)	56	68
16.	Orang dengan HIV AIDS (ODHA)	4	1
17.	Korban Penyalah Gunaan Napza	41	40
18.	Korban Trafiking	-	-
19.	Korban tindak kekerasan	-	-
20.	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	-	-
21.	Korban Bencana Alam	-	2
22.	Korban Bencana Sosial	3	5
23.	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)	363	114
24.	Fakir Miskin	3.077	4.195
25.	Keluarga bermasalah sosial psikologis	22	22
26.	Komunitas Adat Terpencil (KAT)	-	-

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial Kota Banjarbaru

Memperhatikan isu-isu strategis, diatas dan memperhatikan persoalan sosial yang tumbuh dalam masyarakat dan kedepan persoalan sosial akan lebih meningkat, antisipasi terhadap hal dimaksud Kota Banjarbaru mengambil langkah dan kebijakan melalui Dinas Sosial Kota Banjarbaru sesuai tugas dan fungsinya.

Pada saat ini telah melaksanakan kebijakan di bidang Sosial adalah :

1. Melaksanakan Pembinaan Terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Karang Taruna (KT), Penyuluh Sosial , Taruna Siaga Bencana (TAGANA), Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
2. Pembinaan kepada para perintis kemerdekaan
3. Melaksanakan penyuluhan sosial dan pembinaan sosial kepada para tuna sosial.
4. Melaksanakan rehabilitasi sosial, memperbaiki dan pemulihan peran-peren sosial yang terganggu serta memberikan bantuan sosial bagi PMKS
5. Pendampingan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

Permasalahan yang dihadapi terkait tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Banjarbaru adalah:

1. Belum tersedianya panti rehabilitasi untuk penampungan dan pembinaa para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terutama untuk gelandangan pengemis, orang terlantar anak jalanan dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).
2. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) untuk tenaga profesional di bidang kesejahteraan sosial.
3. Masih kurang akuratnya data PMKS.

4. Kurangnya sarana dan prasarana dalam menjalankan kegiatan di lapangan

Permasalahan belum tersedianya panti dan pusat rehabilitasi pembinaan di Dinas Sosial Kota Banjarbaru ini sangat penting, karena selama ini untuk menunjang kegiatan pada seksi bantuan rehabilitasi kesejahteraan sosial.

Sedangkan permasalahan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Sosial bidang kesejahteraan sosial untuk tenaga teknis masih kurang, padahal untuk menunjang kegiatan dilapangan sangat diperlukan tenaga yang profesional yang sesuai dengan bidangnya dalam rangka peningkatan mutu pelayanan di masyarakat.

Pada permasalahan kurangnya sarana dan prasarana dalam menjalankan kegiatan dilapangan yaitu mobil operasional lapangan untuk mengantar orang terlantar dan orang dengan gangguan jiwa. dan PMKS lainnya

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi adalah menguraikan kelemahan dan kekuatan melalui upaya peningkatan dan perbaikan, sehingga tidak menjadi hambatan dalam mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Kota Banjarbaru.

Adapun Kelemahan Dinas Sosial Kota Banjarbaru antara lain :

1. Belum optimalnya SDM (Sumber Daya Manusia) yang tersedia, terutama untuk tenaga teknis bidang sosial, pelatih dan tenaga teknis lainnya.
2. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan yang dilaksanakan.
3. Belum optimalnya perencanaan anggaran.
4. Belum optimalnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian yang diberikan dan belum optimalnya koordinasi antara bidang yang ada

Sedangkan kekuatan yang dimiliki Dinas Sosial Kota Banjarbaru, antara lain :

1. Memiliki rencana strategis sebagai dasar acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
2. Memiliki struktur organisasi, tugas dan fungsi yang jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas.
3. Adanya skala prioritas program kerja.
4. Komitmen pimpinan dalam pengelolaan manajemen kepegawaian
5. Kebijakan didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku
6. Adanya kejelasan pembagian kewenangan, kedudukan, tugas dan fungsi berupa peraturan, pedoman, jukak, juknis pada setiap operasional kegiatan
7. Jumlah sumber daya manusia aparatur yang memadai.
8. Tersedianya dana untuk menunjang program dan kegiatan.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

A. Visi Kota Banjarbaru

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Berkenaan dengan dasar aturan yang menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang telah disampaikan oleh Walikota dan Wakil Walikota, maka Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2016-2021, yaitu

:"TERWUJUDNYA BANJARBARU SEBAGAI KOTA PELAYANAN YANG BERKARAKTER"

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa kondisi Kota Banjarbaru yang ingin diwujudkan dalam 5 (lima) tahun mendatang adalah Banjarbaru yang berkarakter dengan pengertian:

1. **Sumber Daya Manusia yang berkarakter**, yaitu terciptanya sumber daya manusia yang sehat, mempunyai etos kerja tinggi dan berakhlak mulia berdasarkan nilai-nilai religius.
2. **Kota yang berkarakter**, yaitu sebuah kota yang mempunyai ciri khas sebagai kota yang tertata direncanakan (urban design) sehingga menjadi tempat hunian yang indah, aman dan nyaman yang berwawasan lingkungan.

B. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka misi pembangunan daerah tahun 2016-2021 adalah:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang terdidik, sehat, berdaya saing,
2. Meningkatkan penyediaan infrastruktur perkotaan yang merata, cerdas
3. Memperkuat kemandirian, peningkatan kerjasama investasi, penyediaan dan berakhlak mulia dan berwawasan lingkungan prasarana dan sarana perekonomian, peningkatan kelembagaan dan peluang kewirausahaan
4. Melaksanakan reformasi birokrasi yang berorientasi kepada pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi
5. Memperkuat cipta kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tertib

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut perlu strategi yang dilaksanakan berisikan program indikatif. Strategi diperlukan untuk

memperjelas arah pengembangan program prioritas Walikota dan Wakil Walikota.

Salah satu tujuan yang ingin dicapai berdasarkan Visi dan Misi Walikota Banjarbaru Tahun 2016 -2021 yang berhubungan langsung dengan Dinas Sosial Kota Banjarbaru adalah:

1. Melaksanakan reformasi birokrasi yang berorientasi kepada pelayanan Publik dan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi.
2. Memperkuat cipta kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tertib.

Dalam penguatan cipta kondisi masyarakat yang aman, nyaman, dan tertib yang tertuang dalam misi 5 Walikota Banjarbaru dengan tujuan untuk meningkatkan perlindungan kepada masyarakat miskin dengan sasaran strategis, yaitu :

- a. Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Penanganan Penduduk Miskin Berdasarkan Data Terpadu.

Adapun strateginya adalah peningkatan kerjasama dengan Organisasi Sosial/Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), dan Peningkatan Keluarga Penerima manfaat KPM

Arah kebijakan yang akan dilaksanakan :

- a. Pemetaan masyarakat miskin bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- b. Identifikasi kebutuhan penanganan masalah kesejahteraan sosial;
- c. Peningkatan sosialisasi
- d. Penyusunan regulasi yang diperlukan dan;

- e. Peningkatan subsidi bantuan pangan non tunai (BPNT) bagi Keluarga Miskin.

Disamping itu upaya menurunkan kerugian akibat bencana dengan peningkatan kewaspadaan bencana dengan strategi peningkatan sarana dan prasarana.

Pada perkuatan cipta kodisi masyarakat yang aman nyaman dan tertib untuk mendukung tercapainya arah dan tujuan khusus penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalul program-program

1. Program Pemberdayaan Fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya
 2. Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
 3. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit sosial lainnya);
 4. Program Perlindungan Sosial
 5. Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Eks Trauma
- Untuk lebih fokus dan optimalnya capaian arah tujuan dan strategi Pelaksanaan visi dan misi di implementasikan secara berintegrasi antar SKPD terkait, sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya.

3.3 Telaahan Renstra KL dan Renstra SKPD Provinsi

Untuk meningkatkan maksud dan tujuan dari rencana strategis pembangunan organisasi dan masyarakat maka perlu didukung dengan rencana yang matang, efektif, efisien, berdaya guna dan berhasil guna. Serta dapat terlaksana secara berkesinambungan sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang - Undang yaitu mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Untuk itu Pemerintah Daerah selaku pengemban amanat masyarakat harus mempersiapkan secara efektif dan efisien sehingga apa yang dicita-citakan dapat

terwujud salah satunya dengan rencana strategis yang dipersiapkan saat ini.

Adapun program prioritas nasional serta Kementerian Sosial RI No. 30/HUK/2010 tentang Unit Percepatan dan Pengendalian Program Kementerian Sosial (UKP3KS) Tahun 2016.

Program Prioritas Kementerian Sosial RI adalah sebagai berikut:

1. Program Keluarga Harapan (PKH)
2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
3. Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA)
4. Jaminan Sosial Lanjut Usia (Aslut)
5. Jaminan Sosial Penyandang Cacat
6. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)
7. Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
8. Karang Taruna (KT)
9. PPID Kemensos

Sedangkan program dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut:

1. Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
3. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
4. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya
5. Program Penerapan Kepemerintahan yang baik
6. Program Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender
7. Program Rehabilitasi Sosial (yang direncanakan pelaksanaannya tahun 2019)

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD Tahun 2016-2021 Dinas Sosial Kota Banjarbaru ini sangat erat kaitannya dan tidak akan terlepas dari dokumen perencanaan lainnya antara lain:

1. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRVW) provinsi : yang memasukkan Kota Banjarbaru dalam Orde kedua. Penetapan RTRW provinsi tersebut memberikan dukungan dan merupakan peluang bagi pemerintah Kota Banjarbaru dan sesuai dengan Visi SKPD Dinas Sosial Kota Banjarbaru.
2. Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Banjarbaru Tahun 2016-2021: dimana Renstra SOPD harus mengacu dan mempedomani RUTRK tersebut sehingga pada pelaksanaannya tidak akan menyimpang dari RUTRK Banjarbaru Tahun 2016-2021
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021; dimana Renstra SKPD Dinas Sosial Kota Banjarbaru merupakan penjabaran terhadap dokumen perencanaan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021
4. Renstra SKPD lainnya (Stake Holders); dimana Renstra SKPD pada Dinas Sosial Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 harus saling mendukung dalam rangka menjabarkan Renstrada Kota Banjarbaru Tahun 2016- 2021
5. Rencana Strategis SKPD Provinsi yang terkait; dimana Renstra SKPD harus mengacu dan mendukung rencana Strategis SKPD provinsi yang terkait lainnya.
6. Rencana Strategis Kementrian terkait; dimana Renstra SKPD pada Dinas Sosial Kota Banjarbaru harus mendukung dan menjabarkan Renstra Kementerian terkait sesuai dengan bidang tugas yang terdapat pada SKPD

Dokumen Renstra SKPD Dinas Sosial Kota Banjarbaru ini selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja SOPD (Renja SKPD), dimana Renja SKPD menjadi bahan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun setiap tahun. Renja dan RKPD akan menentukan Prioritas dan plafon Sementara (PPAS) dalam menyusun RAPBD Kota Banjarbaru.

1. gambaran pelayanan perangkat daerah
2. Sasaran jangka menengah pada rentra K/L

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Proses pelaksanaan tugas dan kewenangan Dinas Sosial Kota Banjarbaru dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal, faktor internal berupa kebijakan Pemerintah kota Banjarbaru, dan sumberdaya yang berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan pelayanan bidang sosial, sedangkan faktor eksternalnya adalah kebijakan pemerintah provinsi atau pemerintah pusat menyangkut pembangunan bidang sosial dan faktor lainnya diluar faktor internal.

Setelah menganalisa dokumen beberapa dokumen dan kebijakan Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat dan setelah ketersediaan sumberdaya, maka Dinas Sosial mengambil langkah dan strategi memanfaatkan faktor pendorong untuk mengoptimalkan pelayanan bidang Kesejahteraan Sosial.

Adapun isu-isu strategis yang di hadapi oleh Dinas Sosial Kota Banjarbaru

1. Perkuatan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Permasalahan Perkuatan dan Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu permasalahan yang perlu menjadi perhatian saat ini. Hal ini tidak lepas akibat dari masih sangat

kurangnya sarana prasarana terutama di bidang pendidikan dan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang merupakan faktor utama dari terbentuknya sumber daya manusia yang berkualitas.

2. Peningkatan pelayanan publik dan pelayanan pada fakir miskin dan Penyandang masalah kesejahteraan Sosial bahwa seiring dengan perkembangan Kota Banjarbaru sebagai daerah yang mandiri dan berkarakter permasalahan sosial makin meningkat terutama penyandang masalah, perlu antisipasi secara komperhensif terhadap persoalan tersebut.
3. Perbaikan kualitas Pelayanan Publik Agenda utama yang perlu ditempuh adalah terwujudnya pemerintahan yang baik (good govermance) yang sasaran pokoknya adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang professional, kepastian hukum, transparan, partisipasif, akuntabel, memiliki kredibilitas, bersih dan tanggap terhadap segenap kepentingan dan aspirasi rakyat, berkembangnya budaya perilaku birokrasi yang didasari etika, semangat pelayanan dan pertanggung jawaban publik, serta integritas pengabdian dalam mengemban misi pembangunan daerah.